

yang melibatkan komponen aparaturnya penegak hukum (APH), yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang menghasilkan informasi yang bermanfaat dalam penegakan hukum.

Mahkamah Agung merupakan salah satu penyedia data yang dipertukarkan dalam SPPT-TI. Oleh karena itu, dukungan penuh diberikan Mahkamah Agung terhadap penerapan SPPT-TI yang diwujudkan dalam bentuk pengembangan aplikasi SPPT-TI Mahkamah Agung dengan tujuan tercapainya peningkatan, perbaikan, dan pemutakhiran fitur dan fungsi. Pengembangan aplikasi SPPT-TI Mahkamah Agung bertujuan untuk memastikan bahwa sistem yang berjalan saat ini telah sesuai dengan seluruh proses bisnis dalam proses Persidangan Pidana di Lingkungan Peradilan Umum.

Dengan adanya peningkatan, perbaikan, dan pemutakhiran fitur dan fungsi pada Aplikasi SPPT-TI Mahkamah Agung, diharapkan mutu data perkara yang dikirimkan oleh Mahkamah Agung kepada seluruh instansi aparaturnya penegak hukum lainnya, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan (lapas) melalui Sistem Pusat Pertukaran Data (Puskarda) selalu terjaga kualitasnya.

Selain itu, Mahkamah Agung juga telah melakukan penyesuaian pada aplikasi SIPP (sistem informasi penelusuran perkara) yang menjadi sumber data perkara untuk mendukung pemanfaatan data yang dikirim dari APH lain melalui sistem puskarada SPPT TI sehingga dapat digunakan untuk penanganan perkara di pengadilan.

## RENCANA KE DEPAN

### RENCANA KERJA TAHUN 2021

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-903/MK.02/2020 tanggal 02 Oktober 2020 tentang Penyampaian Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2021, Mahkamah Agung RI mendapat alokasi pagu anggaran sebesar Rp11.238.947.386.000,00 (Sebelas trilyun dua ratus tiga puluh delapan milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan perincian per program sebagai berikut.

| No. | Program                       | Rincian Pagu Alokasi Anggaran (Rp) |                      |                       |
|-----|-------------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------|
|     |                               | Operasional                        | Nonoperasional       | Jumlah                |
| 1.  | Dukungan Manajemen            | 9.010.857.733.000,00               | 2.064.672.969.000,00 | 11.075.530.702.000,00 |
| 2.  | Penegakan dan Pelayanan Hukum | 0,00                               | 163.416.684.000,00   | 163.416.684.000,00    |
|     | Jumlah                        | 9.010.857.733.000,00               | 2.228.089.653.000,00 | 11.238.947.386.000,00 |

Pagu anggaran Mahkamah Agung RI tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2020. Anggaran tersebut dialokasikan di antaranya untuk pemenuhan program prioritas nasional dan prioritas Mahkamah Agung, yaitu sebagai berikut.

### Prioritas Nasional

- Dukungan terhadap peningkatan fungsi SPPT TI di pengadilan sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah)
- Dukungan terhadap pengembangan prosedur beracara secara elektronik di pengadilan (*e-court*) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

- (c) Dukungan peningkatan zona integritas di empat wilayah inspektorat sebesar Rp6.923.023.000,00 (enam milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta dua puluh tiga ribu rupiah)
- (d) Diklat sertifikasi hakim niaga sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah)
- (e) Diklat sertifikasi hakim mediator sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah)
- (f) Diklat SPPA terpadu di pengadilan oleh Mahkamah Agung sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah)
- (g) Penyusunan *grand design penguatan kelembagaan juru sita* sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- (h) Pengembangan Kebijakan Mahkamah Agung terkait mekanisme pemeriksaan sidang hak uji materiel sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)
- (i) Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara sebesar Rp29.306.000.000,00 (dua puluh sembilan milyar tiga ratus enam juta rupiah)
- (j) Layanan penyelesaian perkara melalui sidang di luar gedung pengadilan di peradilan umum dan peradilan agama sebesar Rp20.195.500.000,00 (dua puluh milyar seratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)
- (k) Layanan penyelesaian perkara peradilan agama yang diselesaikan melalui sidang terpadu sebesar Rp.690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah)
- (l) Layanan pembebasan biaya perkara di lingkungan peradilan umum dan peradilan agama serta peradilan tata usaha negara sebesar Rp7.901.900.000,00 (tujuh milyar sembilan ratus satu juta sembilan ratus ribu rupiah)
- (m) Bimtek penanganan perkara berbasis keadilan restoratif di Mahkamah Agung sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)

## Prioritas Mahkamah Agung

- (a) Belanja barang operasional untuk menunjang pelaksanaan persidangan secara elektronik, dukungan transportasi, dan sewa rumah dinas hakim, serta pemeliharaan rumah dinas sebesar Rp701.166.491.000,00 (tujuh ratus satu milyar seratus enam puluh enam juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
- (b) Dukungan kajian restoratif justice dan penyusunan kurikulum *restoratif justice* sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)
- (c) Dukungan penyusunan kurikulum hak uji materiel sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
- (d) Penyusunan modul eksekusi bagi panitera dan juru sita sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
- (e) *Handbook* sita eksekusi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- (f) Bimbingan teknis ASN nonhakim yang menunjang peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pada 910 satker daerah dan tujuh eselon I satker pusat sebesar Rp36.397.809.000,00 (tiga puluh enam milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan ribu rupiah)
- (g) Penanganan pencegahan Covid-19 sebesar Rp6.415.000.000,00 (enam milyar empat ratus lima belas juta rupiah)
- (h) Kebutuhan belanja modal untuk penyelesaian pembangunan 25 gedung kantor pengadilan baru, rehab gedung kantor, termasuk penyelesaian konstruksi dalam pengerjaan (KDP) serta pengadaan sarana dan prasarana pendukung *e-litigasi* dengan anggaran sebesar Rp1.006.165.094.000,00 (satu trilyun enam milyar seratus enam puluh lima juta sembilan puluh empat ribu rupiah)